

BAB AKHIR : PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik dan maksimal baik dari segi input, proses dan output. Beberapa kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen Input

- a. Pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara dan Pedoman Pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI namun kebijakan yang ada belum disosialisasikan ke seluruh pengelola alkes serta belum diturunkan berupa Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur yang spesifik untuk KKP. Jabatan Fungsional Elektromedis tidak ada didalam peta jabatan KKP. Petugas pengelola alkes di wilker bertugas tanpa diberi SK oleh Kepala KKP Kelas II Padang dan tidak masuk kedalam uraian tugas SKP.
- b. Tenaga pelaksana dalam kegiatan manajemen logistik alat kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang. SDM yang ada belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang pengelolaan alat kesehatan. Tenaga elektromedis yang ada belum berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tidak tersedia tenaga Radiologi dan Analis Kimia untuk pengoperasian *Portable X-Ray* dan *Hematology Analyzer* serta dokter yang ada belum dilatih untuk mengoperasikan peralatan *USG*. Disamping itu jumlah tenaga ahli Apoteker lebih banyak dibandingkan terampil pada standar jumlah tenaga Farmasi pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standardisasi Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

- c. Dana untuk kegiatan manajemen logistik alat kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang bersumber dari DIPA KKP Kelas II Padang. Dana yang ada masih kurang terutama untuk kegiatan pemeliharaan dan tidak ada alokasi anggaran untuk melengkapi sarana penyimpanan, sosialisasi dan pelatihan serta distribusi alkes ke Wilker Sikakap.
- d. Sarana untuk kegiatan manajemen logistik alat kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang masih kurang terutama untuk sarana penyimpanan alat kesehatan dan belum tersedia gudang peralatan untuk Wilker Bungus dan Muara.

2. **Komponen Proses**

- a. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan alat kesehatan di KKP Kelas II Padang dilaksanakan menurut aturan BMN dan Pedoman Pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI. Masih ada beberapa aspek kegiatan yang belum terlaksana yaitu pada proses penerimaan dokumen tidak lengkap. Penyimpanan kurang tertata, belum seluruh alat diberi label nomor, beban kerja alat tidak dicatat, beberapa alkes yang tidak berfungsi memenuhi ruangan penyimpanan, daftar alat di Aplikasi BMN tidak lengkap serta pelaporan belum dilakukan oleh seluruh seksi.
- b. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang dilaksanakan menurut aturan BMN yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pedoman Pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI. Beberapa hal yang belum sesuai adalah tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang didistribusikan dan laporan realisasi alat kesehatan yang didistribusikan ke Wilker.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang belum terlaksana sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI karena kegiatan inspeksi dan pemeliharaan

preventif belum dilaksanakan. Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan baru berupa pemeliharaan korektif yang dilakukan oleh masing-masing seksi tanpa melibatkan tenaga elektromedik kecuali untuk pemeliharaan mobil ambulance. Tidak ditemukan buku catatan tindakan perbaikan termasuk lamanya waktu perbaikan serta tidak ada laporan pemeliharaan, disamping banyaknya alkes yang belum dikalibrasi.

- d. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara umum kegiatan pengendalian belum terlaksana dengan baik karena tidak seluruh seksi melaksanakan kegiatan pengendalian. Pemeriksaan langsung terhadap gudang dan barang baru dilaksanakan oleh Seksi PRL ke Wilker Sikakap. Tidak ditemukan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan pengiriman hasil pemeriksaan kepada pengelola yang ditembuskan untuk Kepala KKP Kelas II Padang.

3. Komponen Output

Pelaksanaan kegiatan manajemen logistik alat kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang belum terlaksana dengan baik sehingga tidak seluruh alat kesehatan yang ada tersedia dalam kondisi yang siap pakai.

B. Saran

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang

a. Komponen Input

- i. Mengusulkan kepada Ditjen P2P Kemenkes RI untuk menerbitkan petunjuk teknis pengelolaan alat kesehatan di KKP dan memasukan jabatan fungsional elektromedik ke dalam peta jabatan KKP. Contoh perubahan peta jabatan KKP dapat dilihat pada lampiran 23. Disarankan kepada Kepala KKP Kelas II Padang untuk membentuk Tim *Task Force* dan pembuatan SOP pengelolaan alat kesehatan serta menerbitkan SK petugas pengelola alkes di wilker. Contoh SK pengelola dapat dilihat pada lampiran 22 dan contoh SOP dapat dilihat

pada lampiran 17 sd 21. Kepada petugas pengelola BMN agar memasukkan tugas pengelolaan alkes ke dalam SKP.

- ii. Mengusulkan kepada Ditjen P2P Kemenkes RI melalui Kepala KKP Kelas II Padang penambahan jumlah tenaga elektromedik, tenaga radiologi dan analis kimia. Peningkatkan kualitas pengelola alkes melalui pelatihan dan sosialisasi. Tenaga elektromedik yang ada agar diberdayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Melatih dokter yang ada untuk mengoperasikan peralatan USG. Disamping itu mengusulkan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Kepala KKP Kelas II Padang untuk merubah standar jumlah tenaga D3 Farmasi pada KKP lebih banyak dibandingkan Apoteker. Usulan perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standardisasi Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat dilihat pada lampiran 24 dan rincian jumlah SDM yang perlu ditambah dapat dilihat pada lampiran 25.
 - iii. Mengusulkan kepada Ditjen P2P Kemenkes RI melalui Kepala KKP Kelas II Padang, penambahan dana untuk sarana penyimpanan, pemeliharaan, sosialisasi dan pelatihan serta alokasi anggaran untuk transportasi alkes ke Wilker Sikakap. Mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka konsultasi dan *on job training* untuk kegiatan pengelolaan alkes. Jumlah anggaran yang perlu ditambahkan dalam pengelolaan alat kesehatan di KKP Kelas II Padang dapat dilihat pada lampiran 26.
 - iv. Mengusulkan kepada Kepala KKP Kelas II Padang penambahan sarana penyimpanan dan pengadaan gudang peralatan untuk Wilker Muara & Bungus. Usulan penambahan sarana & prasarana dapat dilihat pada lampiran 27.
- b. Komponen Proses
- i. Perbaiki pelaksanaan kegiatan penyimpanan logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang melalui pelatihan tentang cara penyimpanan alat kesehatan yang baik. Dalam tahapan penerimaan alat sebaiknya tim

penerima melengkapi dokumen alat yang diterima. Untuk menghindari kelupaan pada prosedur penerimaan alat sebaiknya tim penerima membuat check list terhadap proses penerimaan alat seperti lampiran 28. Penyimpanan alat sebaiknya ditata dengan baik oleh pengelola alat dengan penambahan sarana penyimpanan seperti lemari dan rak-rak dan seluruh alat kesehatan diberi label nomor. Alat kesehatan yang sudah rusak berat segera diusulkan untuk proses pemusnahan. Kepada pengguna alat agar setiap selesai menggunakan alat, beban kerja alat dicatat. Kementerian Keuangan sebagai lembaga pembuat Aplikasi SIMAK BMN sebaiknya melengkapi daftar alat kesehatan di aplikasi tersebut sehingga seluruh alat kesehatan yang ada dapat diinput kedalam aplikasi sesuai dengan nama alatnya. Untuk sementara sebaiknya petugas BMN membuat catatan tambahan tentang nama alat yang dimaksud di Aplikasi SIMAK BMN berikut dengan foto dokumentasi alat. Seluruh petugas pengelola alat kesehatan membuat laporan penyimpanan alat secara rutin yang memuat kondisi alat dan lokasi penyimpanannya serta mencocokkan nama alat yang ada di SIMAK BMN dengan laporan di masing-masing wilker.

- ii. Perbaiki pelaksanaan kegiatan pendistribusian logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang didistribusikan dan laporan realisasi alat kesehatan yang didistribusikan ke Wilker oleh petugas pengelola alat kesehatan. Disamping itu petugas perlu diberikan pelatihan atau sosialisasi tentang cara-cara distribusi alat kesehatan yang baik.
- iii. Perbaiki pelaksanaan kegiatan pemeliharaan logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang melalui kegiatan inspeksi dan pemeliharaan preventif dan mencatat tindakan perbaikan termasuk lamanya waktu perbaikan oleh pengelola alat. Kepada Kepala KKP Kelas II Padang agar menginstruksikan kepala seksi untuk melibatkan tenaga elektromedik dalam kegiatan pemeliharaan seluruh alat kesehatan.
- iv. Perbaiki pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik alat kesehatan pada KKP Kelas II Padang melalui pelatihan dan

sosialisasi. Disarankan kepada kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan pengendalian untuk membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan mengirimkan berita acara tersebut kepada pengelola dan ditembuskan kepada Kepala KKP Kelas II Padang.

c. Komponen Output

Agar alat kesehatan yang ada di KKP Kelas II Padang selalu tersedia dalam kondisi yang siap pakai sebaiknya petugas pengelola alat kesehatan melaksanakan pedoman pengelolaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjalankan aturan-aturan yang berkaitan dengan BMN dengan baik. Kepada Ditjen P2P Kemenkes RI melalui Kepala KKP Kelas II Padang agar meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan alat kesehatan sehingga seluruh alat kesehatan yang ada dapat dipelihara dengan baik. Tenaga elektromedik perlu ditambah dan dilibatkan dalam pengelolaan alat kesehatan serta petugas pengelola perlu dilatih secara berkala. Sarana dan prasarana yang masih kurang perlu segera dilengkapi. Petunjuk teknis tentang pengelolaan alat kesehatan di KKP hendaknya diterbitkan oleh Dirjen P2P Kemenkes RI dan Kepala KKP Kelas II Padang segera membentuk tim untuk pembuatan SOP pengelolaan alat kesehatan di KKP Kelas II Padang.

2. Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap komponen perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan manajemen logistik alat kesehatan yang baik pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang.